



IMPLIKASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Evan Katana¹, Taun Taun²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, evankatana567@gmail.com¹,
taun@fh.unsika.ac.id²

Abstract

Indonesia is predicted to experience demographic bonuses in 2030-2040. By the time Indonesia is experiencing demographic bonuses, the proportion of the population of productive age (15-64 years) will be greater if compared to the non-productive age (65 years and over) with a share of more than 60% of the total population of Indonesia by 2030-2040 of 297 million people. Demographic bonus in Indonesia is one of the opportunities to make Indonesia an advanced country in accordance with the ideals of the Indonesian people who want to be advanced countries. But when these demographic bonuses are not prepared and used properly, they can create problems that will occur in the future if not in the face of now. The attitude that the government should take in embracing the demographic bonus in Indonesia is to expand the absorption of labour by opening up jobs so that the problem of unemployment can be addressed by opening jobs. The government must take policy by formulating laws and implementing good law enforcement so that it can attract a lot of investment from abroad and domestically. Legal roles in attracting foreign or domestic investment such as providing legal certainty, reducing licensing barriers, intensive enforcement of entrepreneurs, development of education and employment training programmes, provision of legal support for enterprise, and protection of investors in conducting economic activities in Indonesia. This is what the government can do as a policymaker and enforcer in preparing itself to take advantage of the demographic bonus that will occur in Indonesia.

Abstrak

Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga tahun 2040 mendatang. Pada saat Indonesia mengalami bonus demografi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia pada 2030 hingga 2040 mendatang sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi di Indonesia merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menjadi negara maju. Tetapi Ketika bonus demografi tersebut tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang jika tidak disikapi dari sekarang. Sikap yang harus diambil pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi di Indonesia yaitu dengan memperluas penyerapan tenaga

Article History

Submitted: 5 November 2023

Accepted: 14 November 2023

Published: 15 November 2023

Key Words

Law, Demographic
bonuses,
Unemployment, and
Government.

Sejarah Artikel

Submitted: 5 November 2023

Accepted: 14 November 2023

Published: 15 November 2023

Kata Kunci

Hukum, Bonus Demografi,
Pengangguran dan
Pemerintahan.



kerja dengan cara membuka lapangan pekerjaan sehingga permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus mengambil kebijakan dengan membentuk hukum dan melaksanakan penegakan hukum yang baik agar dapat menarik banyak investasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Hukum dan penegakan hukum menjadi salah satu alat pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Peran hukum dalam menarik investasi luar negeri atau dalam negeri seperti memberikan kepastian hukum, pengurangan hambatan perizinan, Pemberian intensif kepada pengusaha, Pengembangan program Pendidikan dan pelatihan kerja, Pemberian dukungan hukum untuk kewirausahaan, dan Perlindungan para investor dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya di Indonesia. Hal tersebut yang dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam mempersiapkan diri untuk memanfaatkan Bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa di tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 sebesar 0,74% hingga menjadi 277 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia mempengaruhi struktur umur penduduk sehingga di prediksi Indonesia akan mengalami Bonus Demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia penduduk nonproduktif (berusia di atas 64 tahun). Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Pada periode tersebut penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Bonus Demografi merupakan munculnya suatu kesempatan yang disebut sebagai jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi menciptakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 yang dimana hal tersebut adalah gagasan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia karena pada tahun 2045 karena 100 tahun Indonesia Merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Namun, Bonus Demografi yang dikelola dengan tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius. Beberapa permasalahan yang dapat timbul adalah tinggi tingkat pengangguran, Pertumbuhan ekonomi yang melambat, Tinggi nya angka kemiskinan dan tingginya kriminalitas.

Pemanfaatan bonus demografi ini dapat dipersiapkan pemerintah melalui Hukum. Hukum digunakan pemerintah Indonesia sebagai dasar untuk mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini Hukum digunakan sebagai suatu sistem untuk mengatur Masyarakat yang berada di dalam nya untuk tujuan mencapai kemakmuran bersama. Kebijakan Hukum yang



kemudian bertujuan mengatur dan memaksa seluruh kegiatan yang ada di Indonesia. Hukum dapat terlibat banyak dalam pengelolaan bonus demografi yang akan di alami Indonesia di tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Seperti memberikan kepastian hukum, pengurangan hambatan perizinan, Pemberian intensif kepada pengusaha, Pengembangan hukum terhadap diskriminasi dalam rekrutmen, Pengembangan program Pendidikan dan pelatihan kerja, Pemberian dukungan hukum untuk kewirausahaan, dan Perlindungan para investor dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya di Indonesia. Dengan cara tersebut investor dapat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan menanamkan modalnya sehingga penyerapan tenaga kerja di Ketika nanti Indonesia mengalami bonus demografi dapat terserap dengan baik dan dampak negatif seperti melonjaknya angka pengangguran tidak dapat terjadi Sehingga pemanfaatan Bonus demografi bisa mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045.

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis seberapa penting Hukum dan Penegakan hukum dalam mempersiapkan untuk Mengoptimalkan dan memanfaatkan Bonus Demografi yang ada di Indonesia sehingga bisa menjadi rujukan Ketika akan membuat hukum dan melaksanakan penegakan hukum karena Hukum dan Penegakan Hukum yang di buat dan di laksanakan sekarang dapat berdampak kepada bangsa Indonesia kedepannya untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Bonus Demografi. Selain itu artikel ini juga di tulis sebagai sumbangsi dalam ilmu pengetahuan terkait sejauh mana hukum berperan dalam mengatasi dan mengatur untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari bonus demografi yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini melalui pendekatan Hukum Empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat yang mengkaji bekerjanya hukum dari aspek Kemanfaatan hukum dalam masyarakat, Peran Lembaga dan institusi terhadap hukum, Penegakan hukum dan Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di Masyarakat atau Lembaga hukum. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum sekunder: Literatur, Karya ilmiah, Bahan Pustaka, serta sumber-sumber lain dari instansi pemerintah terkait, dan internet.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah dalam mengoptimalkan Bonus demografi yang di prediksi akan terjadi di tahun 2030 hingga tahun 2040 mendatang dapat menggunakan sistem hukum yang dimuat dalam bentuk peraturan perundang undangan sebagai alat untuk menarik investasi dalam dan luar negeri agar penyerapan tenaga kerja bisa terserap karena jika tidak terserapnya tenaga kerja akan menimbulkan dampak negatif dari Bonus Demografi yaitu tingginya tingkat pengangguran, Pertumbuhan ekonomi yang melambat, Tinggi nya angka kemiskinan dan tingginya kriminalitas yang dapat berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang ada dalam



Masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan. Salah satu cara untuk terserapnya tenaga kerja adalah dengan cara menarik investor atau penanam modal yang ingin membangun usahanya di Indonesia dari luar maupun dalam negeri. Salah satu yang menjadi ketertarikan investor dalam berinvestasi di sebuah negara adalah mengenai kestabilan politik dan kepastian hukum.

Pemerintah dapat menggunakan dan menciptakan hukum sebagai alat untuk menarik investor dari luar dan dalam negeri karena hukum sebagai peraturan yang jelas dan ditegakkan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa kepastian hukum dan menimbulkan rasa aman bagi para investor dari luar maupun dalam negeri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk menarik investor agar mengembangkan usaha nya di Indonesia sehingga terbukanya lapangan pekerjaan merata dan penyerapan tenaga kerja dapat terpenuhi pada saat Indonesia mengalami bonus demografi di Indonesia.

Hukum dapat di gunakan dan di ciptakan oleh pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Hukum yang diciptakan untuk menarik investasi di Indonesia salah satunya adalah *Tax Holiday* atau pemberian keringanan pajak kepada investor yang akan berinvestasi di Indonesia. *Tax Holiday* adalah salah satu bentuk intensif pajak yang paling sering diberikan untuk menarik investasi asing (Foreign Direct Investment). Keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berbentuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan usaha (PPh) bagi Perusahaan modal asing ke dalam negeri.

Pemerintah dapat menciptakan hukum untuk mempermudah perizinan untuk mendirikan Perusahaan yang akan di bangun di Indonesia. Perizinan yang dimaksud adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh seseorang dalam ranah hukum administrasi negara atas suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perizinan yang harus ada untuk menarik investasi dari luar adalah perizinan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Peran pemerintah dalam hal ini membuat peraturan hukum yang mempermudah masuknya investasi sehingga banyak investor tertarik. Peraturan yang memudahkan investor dalam hal ini adalah menciptakan perizinan yang satu pintu artinya Ketika investor dari luar negeri telah memiliki perizinan dari pemerintah pusat tidak perlu meminta perizinan kepada pemerintah daerah karena Ketika proses perizinan ini banyak sekali pungli agar izin dari pemerintah daerah dikeluarkan sehingga hal tersebut membuat hambatan investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Dalam mengoptimalkan diri untuk bisa memanfaatkan bonus demografi di Indonesia tidak hanya fokus kepada instrumen hukum nya saja tetapi pemerintah harus fokus juga kepada sumber daya manusia. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pembuatan undang-undang dan dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah sebagai alat untuk memberikan program pengembangan Latihan kerja untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperlukan karena semakin berkualitasnya tenaga kerja yang dihasilkan maka semakin



tertarik investor untuk berinvestasi di Indonesia guna terserapnya tenaga kerja Ketika Indonesia mengalami bonus demografi di 2030 hingga 2040 mendatang.

Pengurangan pengangguran juga dapat dilakukan dengan cara mendirikan usaha individu masyarakat atau sekelompok Masyarakat. Pemberian dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Masyarakat yang ingin mendirikan usaha sudah sangat baik beberapa program pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Masyarakat yang ingin mendirikan usaha melalui program-program pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti Pembiayaan modal yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sudah diatur melalui anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah sehingga dapat bermanfaat untuk peningkatan Masyarakat dalam mendirikan usaha. Hal ini juga menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengoptimalkan agar tidak terjadinya peningkatan pengangguran yang di akibat kan bonus demografi yang di prediksi akan terjadi di Indonesia.

Perlindungan Investor dalam maupun luar negeri dalam menjalankan usahanya di Indonesia juga yang harus menjadi perhatian penting dari pemerintah. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan negara melalui para penegak hukum untuk menciptakan rasa aman sehingga tidak ada nada kerugian karena premanisme, Kekerasan, dan Teror yang dirasakan para investor dari dalam maupun luar negeri dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

Kesimpulan

Bonus demografi yang di prediksi akan terjadi di Indonesia harus bisa dioptimalkan agar bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan nya agar mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 yang menjadi gagasan dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Mengoptimalkan Bonus Demografi ini juga bertujuan agar tidak terjadi dampak negatif dari bonus demografi yang diakibatkan dari persiapan pemerintah sebagai pengatur kebijakan sehingga dampak negatif bonus demografi ini terjadi seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingginya angka pengangguran, tinggi nya kriminalitas dan tingginya angka kemiskinan. Pemerintah dapat mencegah itu semua melalui regulasi hukum yang dibuat untuk kepentingan masyarakat bersama.

Pemerintah dapat membuat regulasi hukum yang bertujuan agar banyak investor asing tertarik untuk berinvestasi di indonesia sehingga dapat menyerap lapangan pekerjaan saat Indonesia mengalami bonus demografi nanti. Regulasi hukum yang dapat dibuat seperti Pemberian intensif pajak kepada investor, Perizinan di buat semudah dan sesederhana mungkin, Membuat pelatihan pengembangan program Pendidikan dan pelatihan kerja, Memberikan dukungan hukum kepada wirausaha melalui peraturan yang dapat membantu



Masyarakat agar dapat membangun usahanya, dan perlindungan Investor asing maupun lokal dalam menjalankan usahanya di setiap daerah. Beberapa hal tadi dapat dikemas dalam suatu produk peraturan perundang-undangan oleh dibuat pemerintah dan Dewan perwakilan rakyat di Indonesia agar dapat mengoptimalkan Bonus Demografi di Indonesia dengan cara pelaksanaan peraturan yang telah di buat.

Saran

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membuat peraturan perundangn-undangan buat lah produk perundang-undangan yang mencegah terjadinya dampak buruk dari Bonus Demografi yang akan terjadi di Indonesia dan mengoptimalkan pemanfaatan Bonus Demografi. Produk perundangn-undangan yang di buat adalah seperti pengembangan pelatihan kerja, memberikan Intensif pajak kepada investor, dan membuat undangn-undang untuk perizinan usaha kepada investor asing.
2. Kepada Penegak Hukum tegakan lah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kuatkan integritas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan tegakan hukum di negeri ini untuk mencapai negara yang aman, damai, dan tertib sehingga kepastian hukum dari para penegak hukum inilah yang kemudian memberikan dampak masuknya investasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Setiawan, S. A. (2019, July 9). MENGOPTIMALKAN BONUS DEMOGRAFI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).
<https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>

Aribowo, I., & Irawan, D. (2021, March 31). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>

Andika, O., Wibowo, W., Bagus, I., & Djaja, R. (n.d.). *KENDALA PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA*.

Dokumen Pmerintah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Website

Krisnawati, R. (2023, September 6). *10 Negara Dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2022-2023*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6917020/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-2023>.



Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M. (2023, August 15). *mpr*. mpr.go.id. Retrieved November 7, 2023, from <https://www.mpr.go.id/berita/Bonus-Demografi-Harus-Mampu-Wujudkan-Kesejahteraan-Masyarakat#:~:text=Bonus%20demografi%20yang%20dimaksud%20adalah,dari%20total%20jumlah%20penduduk%20Indonesia>.

Maksimalkan Potensi Demografi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menjadi Hal yang Krusial - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3723/maksimalkan-potensi-demografi-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-menjadi-hal-yang-krusial>.

Menyongsong Indonesia Emas, Menko PMK : Manfaatkan Momentum Emas Bonus Demografi | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (n.d.). <https://www.kemenkopmk.go.id/menyongsong-indonesia-emas-menko-pmk-manfaatkan-momentum-emas-bonus-demografi>.